

Jakarta, 1 Juli 2022/1 July 2022

Nomor / Number : 1280/692/DCS/2022
Lampiran / : 1 (Satu) Dokumen
Attachment
Perihal / Subject : Laporan Informasi atau Fakta Material PT Aneka Tambang Tbk sehubungan dengan Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan Sebagian Segmen Usaha Pertambangan Nikel
Information Disclosure or Material Facts of PT Aneka Tambang Tbk in connection with the Announcement of the Abridged Spin-off Plan for the Nickel Mining Business Segment

To
The Australian Securities Exchange (ASX)

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Merujuk kepada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**") dan (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**"), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Referring to: (i) Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies ("**OJK Regulation 31/2015**"), (ii) Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 of 2021 dated 29 January 2021 on the Amendment of Regulation Number I-E on the Obligations to Submit Information ("**Regulation I-E**"), we hereby convey the following:

1.	Tanggal kejadian / <i>Date of occurrence</i>	1 Juli 2022	1 July 2022
2.	Jenis informasi atau fakta material / <i>Type of information of material facts</i>	Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan	Announcement of the Abridged Spin-off Plan
3.	Uraian informasi atau fakta material / <i>Details of information material facts</i>	Pada tanggal 1 Juli 2022, PT Aneka Tambang Tbk (" Perseroan ") telah mengumumkan ringkasan rencana pemisahan sebagian segmen usaha pertambangan nikel kepada 2 (dua) anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Nusa Karya Arindo (" NKA ") dan PT Sumberdaya Arindo (" SDA "), yang merupakan bagian dari rencana penyertaan modal dalam bentuk lain	On 1 July 2022, PT Aneka Tambang Tbk (the " Company ") has announced the abridged spin-off plan for the nickel mining business section to its 2 (two) subsidiaries, namely PT Nusa Karya Arindo (" NKA ") and PT Sumberdaya Arindo (" SDA "), which are part of the plan for equity participation in the form of other than cash (in-kind contribution) (" Spin-off)

		selain tunai ("Rencana Pemisahan") pada surat kabar harian Media Indonesia sebagaimana terlampir.	Plan") in the daily newspaper of Media Indonesia as attached.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The impact of such material event, information or fact to the Company's operational activities, legal, financial condition, or business continuity.</i>	<p>Rencana Pemisahan ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan asset Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("WIUP"): anak perusahaan diharapkan dapat melakukan pengembangan dan pengelolaan aset WIUP yang lebih intensif dan efektif kedepannya, sehingga pemanfaatan aset nikel dapat dilakukan secara optimal untuk menghasilkan produk – produk akhir dari komoditas nikel yang berkualitas tinggi dan mendukung inisiatif hilirisasi nikel. 2. Akselerasi dan diversifikasi pengembangan usaha: anak perusahaan yang menerima pemisahan juga diharapkan untuk menjadi lebih fokus, kompetitif, dan fleksibel dalam pengambilan keputusan dan peluang bisnis. Selain itu, rencana pemisahan merupakan salah satu upaya diversifikasi pengembangan usaha, khususnya sebagian segmen usaha nikel yang harapannya dapat mendukung inisiatif hilirisasi nikel. 3. Potensi kerja sama strategis: anak perusahaan yang menerima pemisahan diharapkan dapat membuka kesempatan untuk melakukan kerja sama strategis untuk menciptakan nilai tambah bagi produk anak perusahaan dan memperkuat rantai pasok produksi komoditas nikel. 	<p>This Spin-off Plan is expected to provide number of benefits as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimization of Mining Business License Areas (Wilayah Izin Usaha Pertambangan or "WIUP") asset management: subsidiaries are expected to be able to develop and manage WIUP assets more intensively and effectively in the future, so that nickel asset utilization can be carried out optimally to produce high quality nickel end products and support nickel downstream initiatives. 2. Acceleration and diversification of business development: subsidiaries that receive the spin-off are also expected to be more focused, competitive, and flexible in decision-making and business opportunities. In addition, the spin-off plan is one of the efforts to diversify business development, especially for some of the nickel business segment, which is expected to support nickel downstream initiatives 3. Potential for strategic cooperation: subsidiaries that receive the spin-off are expected to open up opportunities for strategic cooperation to create added value for the subsidiary's products and strengthen the supply chain for nickel commodity production.

	<p>4. Penciptaan nilai tambah untuk pemegang saham: Terciptanya optimalisasi pengelolaan aset, akselerasi dan pengembangan usaha, dan potensi kerjasama strategis diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham sebagai tujuan akhir dari pemisahan.</p> <p>Dengan demikian, Rencana Pemisahan sebagai salah satu bentuk dari inisiatif hiliriasi komoditas nikel merupakan langkah strategis Perseroan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan ekosistem industri baterai untuk kendaraan listrik nasional.</p>	<p>4. Creation of added value for shareholders: Optimization of asset management, business acceleration and development, and potential for strategic cooperation is expected to improve financial performance and create added value for shareholders as the ultimate goal of the spin-off.</p> <p>Thus, the Spin-off Plan as a form of nickel downstream initiative is a strategic step for the Company that can contribute to the development of the battery industry ecosystem for national electric vehicles.</p>
5. Keterangan lain-lain / Others	Tidak ada.	None.

Demikian kami sampaikan Keterbukaan Informasi dalam rangka memenuhi POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Thus, we informed this Information Disclosure in order to comply with OJK Regulation 31/2015 and Regulation I-E.

Thank you for your attention.

Hormat kami/Yours faithfully,
PT Aneka Tambang Tbk



Syarif Faisal Alkadrie
Corporate Secretary Division Head

DEFINISI DAN SINGKATAN

BEI atau Bursa Efek	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempermudah penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di bursa dan/atau di luar bursa, hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengantara dan penerbit hak dan kewajibannya.
BNI	: Berta Negara Republik Indonesia.
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Grup MIND ID	: PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan anak-anak perusahaannya.
Kementerian	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dan waktu ke waktu.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Merkunham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dan waktu ke waktu.
NKA	: PT Nusa Karya Arindo.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Lembaran Independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dan waktu ke waktu ("UU OJK"), yang meliputi otoritas, wewenang dan tanggung jawab pengawas kegiatan usaha keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perusahaman, dan pensur, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerimai hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengawas dan pengawas dari otoritas Pengawas Pasar Modal ("Bapepam-LK") sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 55 UU OJK.
---------------------------------	--

Pemisahan	: Pertahanan selanjutnya, pertambangan nikel Perseroan dengan cara mengalihkan aset dan liabilitas yang terkait dengan usaha pertambangan nikel Perseroan yang berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, kepada NKA dan SDA, anak perusahaan terkendali Perseroan yang keduanya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%.
-----------	--

Perseroan	: PT Aneka Tambang Tbk.
-----------	-------------------------

PKP	: Pengusaha Kena Pajak.
-----	-------------------------

PMK 56 Tahun 2021	: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/P/PMK.01/2021 tentang Penggunaan Nila Rupiah atas Pengelolaan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Pengembangan, Pelajaran, Pemekaran, atau Pengambilahan Usaha, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.10/2021.
-------------------	--

POJK No. 33/2014	: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Detil dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014.
------------------	---

POJK No. 31/2015	: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Ketertiban dan Penyebarluasan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 22 Desember 2015.
------------------	---

POJK No. 30/2017	: Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dilakukan oleh Perusahaan Terbuka tertanggal 22 Juni 2017.
------------------	---

POJK No. 15/2020	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyebarluasan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 21 April 2020.
------------------	---

POJK No. 17/2020	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal 21 April 2020.
------------------	---

POJK No. 42/2020	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Bentukpen Kepentingan tertanggal 21 Juli 2020.
------------------	---

PP 34/2016	: Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengelahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bersama Perubahan.
------------	---

PPh	: Pajak Penghasilan.
-----	----------------------

PPN	: Pajak Pertambahan Nilai.
-----	----------------------------

PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang merupakan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
------	--

Rancangan Pemisahan	: Rancangan Pemisahan yang disiapkan oleh Perseroan sehubungan dengan Pemisahan.
---------------------	--

RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang bertujuan untuk menyelenggarakan rancangan perseroan yang dikenakan pada tanggal 23 Agustus 2022.
--------	---

SDA	: PT Sumberdaya Arindo.
-----	-------------------------

Transaksi Afiliasi	: Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
--------------------	---

Undang-Undang Cipta Kerja	: Undang-Undang No. 13 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245 Tahun 2020.
---------------------------	---

Undang-Undang Ketenagakerjaan	: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279 sebagai tambahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
-------------------------------	---

Undang-Undang Pasar Modal	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3650.
---------------------------	---

UU PPh	: Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana dilakukannya perbaikan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 246 Tahun 2021, Tambahan No. 6736.
--------	---

UU UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan, terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 108 Tahun 2007, Tambahan No. 4759 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
---------	--

Judul-judul dan klause-klausu pada Rancangan Pemisahan ini hanya dimaksudkan sebagai kemudahan dalam melukau rujukan saja dan tidak dapat dipakai untuk menentukan isi Rancangan Pemisahan ini.

Rancangan Pemisahan ini dibuat dengan menggunakan UUPT, PMK, dan Peraturan Perpajakan yang dikenakan pada tanggal 23 Agustus 2023 sebanyak 30%
--

Pemisahan lingkungan saat ini membuktikan tuntutan dan pelajaran sebenarnya. Pemisahan lingkungan yang ada berupa emisi gas rumah terdiri sebanyak 42 gigaton yang dikenakan oleh manusia per tahun. Menurut analisa Boston Consulting Group, setiap ton emisi gas rumah yang dikenakan oleh manusia per tahun akan meningkat sebesar 2,5% per tahun. Dengan demikian, setiap ton emisi gas rumah yang dikenakan oleh manusia per tahun akan meningkat sebesar 2,5% per tahun.
--

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	: Struktur pemilikan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 32 tanggal
--------------------------------------	---

DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

IDX or Indonesia Stock Exchange	The party that organizes and provides a system and/or the means to bring together the offers to buy and sell securities of other parties with the purpose of trading the securities between them, which in this case is the Indonesia Stock Exchange (PT Bursa Efek Indonesia), domiciled in South Jakarta, or any of its successors, assigns and transferees.
BNRI	State Gazette of the Republic of Indonesia.
BPHBT	Fee for the Acquisition of Rights on Land and/or Buildings.
MID ID Group	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) and its subsidiaries.
MoLHR (Kemenkumham)	Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as amended from time to time.
KSEI	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Minister of Law and Human Rights	Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as amended from time to time.
NKA	PT Nusa Karya Arindo.
Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority) or OJK	An independent institution as referred to in Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, as amended from time to time ("OJK Law"), whose duties and authorities include regulating and supervising financial service activities in the banking sector, capital market, insurance, pension funds, financing institutions and other financial institutions, where as of December 2019, OJK Law has been replaced by Law no. 13 of 2019 regarding the rights and the obligations to carry out the regulatory and supervisory functions of the Capital Market Supervision Agency (Badan Pengawas Pasar Modal or "Bapepam") and/or Bapepam and Lemaga Keuangan ("Bapepam-LK"), in accordance with the provisions of Article 55 of the OJK Law.

Spin-Off	A spin-off of the Company's partial segment of nickel mining business by transferring a portion of its assets and liabilities related to the Company's nickel mining business located in East Halmahera, North Maluku, to NKA and SDA, the Company's controlled subsidiaries, both of which are more than 99% owned by the Company directly or indirectly.
----------	--

Company	PT Antam Tambang Tbk
---------	----------------------

PKP	Taxable Employer.
-----	-------------------

PMK 56 of 2021	Regulation of the Minister of Finance Number 52/PMK.01/2017 concerning Use of Book Value for Transfer and Acquisition of Assets in the Context of Merger, Consolidation, Expansion, or Business Acquisition, as last amended by Regulation of the Minister of Finance Number 56/PMK.01/2021.
----------------	--

POJK No. 33/2014	OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company dated December 8, 2014.
------------------	---

POJK No. 31/2015	OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company dated December 22, 2015.
------------------	--

POJK No. 30/2017	OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 regarding Share Buy-back issued by Public Company dated June 22, 2017.
------------------	---

POJK No. 15/2020	OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company dated April 21, 2020.
------------------	--

POJK No. 17/2020	OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities dated April 21, 2020.
------------------	--

POJK No. 42/2020	OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interests Transactions dated July 2, 2020.
------------------	--

PP 34/2016	Government Regulation No. 34 of 2016 concerning Income Tax on Income from the Transfer of Rights on Land and/or Buildings, and Sale and Purchase Agreement on Land and/or Buildings and its Amendments.
------------	---

PPh	Income tax (Pajak Penghasilan).
-----	---------------------------------

PPN	Value Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai).
-----	--

PSAK	Statement of Financial Accounting Standards (Perintah Standar Akuntansi Keuangan), which is part of the Financial Accounting Standards in Indonesia.
------	--

Spin-Off Plan	Spin-Off Plan prepared by the Company in connection with the Spin-Off.
---------------	--

EGMS	The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company with the aim of approving the Spin-Off plan which is planned to be held on August 23, 2022.
------	--

SDA	PT Sumberdaya Arindo.
-----	-----------------------

Affiliated Transaction	Transactions as defined in POJK No. 42/2020.
------------------------	--

Job Creation Law	Law No. 11 of 2020 dated November 2, 2020 concerning Job Creation, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 245 of 2020.
------------------	--

Labour Law	Law No. 13 of 2003 dated March 25, 2003 concerning Manpower, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 of 2003, Supplement to No. 42/29 as amended by the Job Creation Law.
------------	---

Capital Market Law	Law No. 8 of 1995 dated November 10, 1995 concerning the Capital Market, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64 of 1995, Supplement to No. 368.
--------------------	--

Income Tax Law	Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax as last amended by Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 246 of 2021, Supplement to No. 67/6.
----------------	---

VAT Law	Law No. 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as last amended by Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 246 of 2021, Supplement to No. 67/6.
---------	--

Company Law	Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 106 of 2007, Supplement to No. 47/56 as amended by the Job Creation Law.
-------------	--

The titles of the clauses in this Spin-Off Plan are only intended as convenience in making a reference and shall not be used in the construction of the contents of this Spin-Off Plan.

This Spin-Off Plan is made with reference to the Company Law. This Spin-Off Plan is prepared and submitted to the authorities, the public and employees of the Company in order to comply with the principle of information disclosure. Therefore, in accordance with the applicable regulations, the Spin-Off Plan will be published in national newspapers which shall also contain the notification regarding the time given to all parties, especially for the Company's creditors to submit objections if any.

CHAPTER I RECITAL

Today's environmental problems has raised both challenges and opportunities at the same time. The existing environmental problems in the form of greenhouse gas emissions has been accounted for as many as 42 gigatons of gas emissions induced by human actions according to the Ministry of Energy and Mineral Resources, data as much as 23% (twenty three percent) of this figure comes from the exhaust gas from the transportation vehicles that use fossil fuel. This is the result of increasing the earth's temperature by 4 (four) °C which has a potential to melt the Himalayan glaciers very quickly and resulted in natural disasters.

In 2017, the total CO2 emission produced in the world was 36.2 billion tons, of which 19 billion tons or about 53% (fifty three percent) of this total CO2 production was produced in China. In that year, Indonesia produced 487 million tons of CO2 gas. These greenhouse gas emissions are dominated by the burning of fossil fuels from commercial cars, trucks, ships, trains, and planes which use petroleum in the form of gasoline and diesel.

This condition is both a challenge and an opportunity for the MIND ID Group (in this case represented by the Company) to initiate a renewable energy development plan.

One of the developments of renewable energy is to establish the electric vehicle (EV) ecosystem. In early 2020, the sale and use of EV on a commercial scale has been initiated. According to the analysis of the Boston Consulting Group, the trend of EV use will continue to increase from year to year with an estimated 30% of EV use in 2030, followed by the use of Hybrid & Mild Hybrid Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Vehicle (PHEV) and Battery Electric Vehicle (BEV).

The increasing trend in EV use has created an increasing need for battery storage (EV Battery) as the energy source of the EV. The main raw material for the manufacture of EV Battery is Nickel. According to the studies from the Ministry of Energy and Mineral Resources, the growth of renewable energy for battery storage has increased by 79% (seventy-nine percent) per year. South Korea, Japan and the United States are the three countries that experienced the highest growth, where the EV battery capacity of 1.78 MW can be produced by South Korea, 1.39 MW can be produced by Japan and 1.27 MW can be produced by the United States. On the other hand, China can produce EV battery with a capacity of 705 MW.

ANTAM as the owner of the second largest nickel resources in Indonesia has the initiative to take advantage of the increasing trend of EV use by participating in the development of the EV Battery industry ecosystem. One of the Company's first steps to support the use of EV Battery is to conduct a partial spin-off of the assets and liabilities related to the Company's nickel mining business located in East Halmahera, North Maluku, to its subsidiaries, NKA and SDA. The benefits of this spin-off are (i) to develop and manage assets more optimally so that they can support the fulfillment of demand for nickel processed commodities and products; (ii) to accelerate business development by having a focused, competitive, and flexible management in decision making and business opportunities, and (iii) to open up new opportunities for strategic cooperation to develop business and anticipate future business opportunities.

The spin-off that will be carried out by the Company is an impure spin-off as referred to in article 135 paragraph (1) letter b and paragraph (3) of the Company Law, which after the spin-off is effective, it will result in a portion of the assets and liabilities of the Company being transferred to law 1 (one) or more company or companies that receive the transfer, and the company who did the Spin-Off still exists.

Therefore, the Company will carry out the Spin-Off of assets and liabilities to 2 (two) subsidiaries of the Company, namely NKA and SDA, where the Company's share ownership in these 2 (two) subsidiaries is more than 99% (ninety nine percent) respectively, either directly or indirectly. Considering that the Spin-Off is carried out to 2 (two) subsidiaries which are more than 99% (ninety nine percent) owned by the Company either directly or indirectly, then this Spin-Off is a transaction that is excluded from the provisions of material transactions or affiliated transactions. To comply with the provisions of Article 127 paragraph (2) of the Company Law, the Company shall announce this Spin-Off Plan through 1 daily newspaper and the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id) and the Company's website (www.antam.com).

The Company will submit a report to the Financial Services Authority and announce through the Indonesia Stock Exchange website to comply with the provisions of POJK No. 17/2020, POJK No. 42/